



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bombana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
13. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
6. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
7. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
8. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
9. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
11. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA Pasal 2

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana untuk :

- a. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. Penyusunan dokumen tahunan dan anggaran;
- d. Pengukuran kinerja;
- e. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3

Indikator kinerja utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana Bombana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana diberikan tugas untuk melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

- b. Inspektorat Kabupaten Bombana melakukan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama setiap Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 5

Indikator kinerja utama disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB III PENUTUP

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 7 April 2020

BUPATI BOMBANA,

TTD

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 7 April 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA,

TTD

H. BEANGGA HARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2020 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG HUKUM,


SYAHRIAL ABDI ARIEF, SH

Penata Muda Tk.I, III/d

NIP. 19811110 200804 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 68 TAHUN 2020

TANGGAL : 7 April 2020

TENTANG : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan pemerintahan yang baik (*good governance*) seiring dengan program reformasi birokrasi bahwa kebijakan pada hasil (*result oriented government*). Pemerintah yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. *Output* dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran, karena prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money* (apabila tidak ada kinerja atau tidak berkinerja, maka tidak ada uang atau tidak memperoleh anggaran).

Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan *good governance* dan *result oriented government*, perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya perlu diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja. Dengan demikian perencanaan anggaran yang disusun betul-betul berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerja sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berupaya membangun sistem manajemen pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas kerterbukaan, azas proporsionalitas dan profesional, serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan

hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggara pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan hasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Bombana menetapkan IKU dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bombana, maka dipandang perlu menetapkan IKU, dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja yang baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU), dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Bombana, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggungjawab. Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini, diharapkan para pimpinan juga harus mampu menunjukan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat disajikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

BUPATI BOMBANA,

TTD

H. TAFDIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG HUKUM,


SYAHRIAL ABDI ARIEF, SH

Penata Muda Tk.I, III/d

NIP. 19811110 200804 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 68 TAHUN 2020

TANGGAL : 17 APRIL 2020


TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNGJAWAB
1	MELANJUTKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	Meningkatkan Daya Saing Infrastruktur	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks pelayanan infrasuruktur dasar	Presentase panjang jalan Kabupaten kondisi mantap + Presentase rumah tangga memiliki akses air minum terlindungi + Presentase rumah tangga yang memiliki akses limbah domestik layak dibagi 3	Dinas PU dan Penataan Ruang
				Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Indeks Konektivitas wilayah	Rasio konektivitas Kabupaten = (IK1x Bobot Angkutan Jalan) + (IK2 x Bobot ASDP) Ket : IK1 (Angkutan Jalan) = $\frac{\text{Jumlah trayek yang dilayani} \times \text{bobot trayek}}{\text{Jumlah kebutuhan trayek}}$ IK2 (ASDP) = $\frac{\text{Jumlah lintas penyebrangan yang beroperasi di Kabupaten}}{\text{Jumlah kebutuhan lintas penyebrangan di Kabupaten}}$	Dinas Perhubungan
2	MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Pelayanan Publik Berkualitas	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Rata-Rata Nilai Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik	Dinas Perpustakaan, Dinas PM dan PTSP, BPBD, Dinas Kependudukan dan Capil, Dinas Satpol PP, RSUD, Dinas Kominfo dan Statistik
				Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Opini atas Laporan Keuangan Pemda	Opini Atas Laporan Keuangan oleh BPK	Badan Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah
				Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Peningkatan Nilai Predikat SAKIP	Predikat SAKIP oleh Kemenpan & RB	BAPPEDA, Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi Setda dan Seluruh OPD
				Indeks Profesionalitas ASN	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$ </div> </div> <p>Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin</p> <p>W_{1j} * R_{1j} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j W_{2k} * R_{2k} = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k W_{3l} * R_{3l} = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l W_{4m} * R_{4m} = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m</p>	BKPSDM	

3	MELANJUTKAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Secara Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan PDRB	$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$	Dinas Petanian, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindagkop dan UKM, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata
---	--	---	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------	---	---

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNGJAWAB
				Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH_Kabupaten = (IPA x 30%) + (IPU x 30%) + (ITH x 40%) dimana: IKLH_Kabupaten = Indeks Kualitas Lingkungan Kabupaten IPA = Indeks Pencemaran Air IPU = Indeks Pencemaran Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU dan Penataan Ruang
4	MELANJUTKAN UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Jumlah Usia Orang Yang Meninggal dibagi Jumlah Orang Yang Meninggal Pada tahun berkenaan	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
				Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Indeks harapan lama sekolah + Indeks Rata-rata lama sekolah dibagi 2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ dimana: HLS _a ^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E _i ^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren	Dinas Perumahan, Dinas Sosial, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
5	MELANJUTKAN PEMANTAPAN PEMBANGUNAN BUDAYA MASYARAKAT BOMBANA	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Budaya	Indeks Pembangunan Budaya	Meningkatnya Pelestarian Budaya Lokal	Tingkat Pelestarian Budaya Lokal	(Jumlah Benda/Seni/Bahasa/Objek Budaya Lainnya yang sudah Dilestarikan dibagi Jumlah Benda/Seni/Bahasa/Objek Budaya Lainnya yang terdaftar x 0,9) + (Jumlah Kelompok Seni/Budaya yang dianggap Lestari dibagi Jumlah Kelompok Seni/Budaya yang ada x 0,1)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Meningkatnya Minat dan Budaya Literasi Masyarakat	Indeks aktivitas literasi membaca	Cakupan jumlah pengunjung perpustakaan + Indeks Budaya Baca dibagi 2	Dinas Perpustakaan

Salinan sesuai dengan aslinya
 KABAG HUKUM,

SYAHRIAL ABDI ARIEF, SH
 Penata Muda Tk.I, III/d
 NIP. 198111110 200804 1 001

BUPATI BOMBANA,

 TTD

H. TAFDIL

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 68 TAHUN 2020

TANGGAL : 17 APRIL 2020

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NO.	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks pelayanan infrastruktur dasar	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan Kabupaten dalam mendukung konektivitas wilayah	Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang)	Persen	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) (:) Jumlah panjang jalan Kabupaten keseluruhan dikali 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan air minum aman dan sanitasi layak	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki sumber air minum terlindungi	Persen	Jumlah rumah tangga yang memiliki sumber air minum terlindungi (:) Jumlah rumah tangga di kabupaten Bombana dikali 100%	
				Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas air limbah domestik	Persen	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas air limbah domestik (:) Jumlah rumah tangga di kabupaten Bombana dikali 100%	
2.	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Indeks Konektivitas wilayah	Meningkatnya cakupan Kecamatan yang mendapat layanan angkutan	Persentase kecamatan terhubung dengan ibu kota Kabupaten	Persen	Jumlah jaringan trayek yang terlayani angkutan umum / total jaringan trayek yang harus tersedia x 100%	Dinas Perhubungan
3.	Terwujudnya Pelayanan Publik Berkualitas	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan prima dalam mendukung berinvestasi	Cakupan pelayanan perizinan sesuai dengan SOP	Persen	Jumlah perizinan yang diterbitkan sesuai dengan SOP/ Jumlah Izin yang di ajukan x 100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks tata kelola kependudukan dan pencatatan sipil	Persen	Jumlah cakupan KK, KTP-el, Akta Perkawinan, dan akta kelahiran / 5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik OPD	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan OPD	Nilai	Nilai kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survei	Satuan Polisi Pamong Praja
			Meningkatnya pelayanan publik	Persentase laporan pendukung tugas perangkat daerah yang disusun/dihasilkan	Persen	$\frac{\text{Jumlah Kepuasan masyarakat}}{\text{Jumlah Keseluruhan layanan IKM Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Sekretariat Daerah
			Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	Persen	Jumlah indikator SPM yang mencapai target dibagi Jumlah seluruh Indikator SPM x 100%	Rumah Sakit Umum Daerah
				Persentase indeks Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggara publik	Persen	Nilai Rata-Rata IKM	

NO.	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
4.	Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		Meningkatnya akses/layanan Informasi dan Komunikasi	Indeks SPBE	Indeks	Nilai SPBE	Dinas Komunikasi,
			Terintegrasinya sistem aplikasi pemerintahan untuk mempercepat pertukaran data	Cakupan Statistik Dasar dan Sektoral yang Terintegrasi	Ada/tidak	Adanya Statistik Dasar dan Sektoral Terintegrasi	
			Meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil Kelitbangan yang telah dilaksanakan	Jumlah hasil-hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan	Persen	Hasil kelitbangan yang termanfaatkan dibagi Jumlah total penelitian yang terlaksana x 100%	Badan Penelitian dan Pengembangan
			Meningkatnya inovasi dan teknologi	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	Persen	Hasil inovasi dan teknologi yang telah diterapkan dibagi Jumlah total inovasi dan teknologi x 100%	
		Opini atas Laporan Keuangan Pemda	Meningkatnya tata kelola pengelolaan daerah yang akuntabel	Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai SAP	Persen	Jumlah OPD yang menyusun laporan LKPD yang sesuai SAP / Jumlah OPD se Kabupaten Bombana x 100%	Badan Keuangan Daerah
			Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	$PAD_{t_n} - PAD_{t_{(n-1)}} / PAD_{t_{(n-1)}} \times 100\%$	
			Meningkatnya kualitas SDM APIP	Peningkatan kapasitas APIP	Level	Tingkat perkembangan kapabilitas APIP (Hasil QA BPK)	Inspektorat Daerah
		Peningkatan Nilai Predikat SAKIP	Meningkatnya konsistensi antar dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan Daerah	Persen	Jumlah program RKPD yang konsisten dengan program pada RPJMD / Jumlah program pada RKPD x 100%	BAPPEDA
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Predikat	Predikat SAKIP oleh Inspektorat	Seluruh OPD
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Kabupaten komponen Laporan	Predikat	Hasil evaluasi SAKIP Kemenpan dan RB Komponen Laporan	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya pengawasan yang efektif dan pembinaan lingkup intern	Persentase hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK	Persen	Perbandingan jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan jumlah keseluruhan rekomendasi	Inspektorat Daerah
					Persen	$\frac{\text{Persentase jumlah OPD yang nilai minimal B}}{\text{Total semua OPD}} \times 100\%$	
					Level	Tingkat perkembangan maturitas SPIP (Hasil QA BPK)	
			Meningkatnya masyarakat tangguh bencana	Persentase pemahaman dan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	Persen	Jumlah Desa Rawan Bencana yang telah di telah dilatih dibagi jumlah Total Desa Rawan Bencana X 100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO.	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
			Terwujudnya peningkatan penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan tepat	Persentase penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persen	Jumlah bencana yang terjadi pada tahun tersebut dibagi Jumlah penanganan bencana pada tahun tersebut x 100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Meningkatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	Persen	Jumlah penanganan pemulihan masyarakat dan jumlah rekonstruksi pasca bencana dibagi jumlah kegiatan pada tahun tersebut x 100%	
			Terwujudnya penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat	Indeks desa membangun	Poin	Rata-rata nilai indeks desa membangun se- Kabupaten Bombana	
			Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berdemokrasi	Indeks demokrasi lokal	Nilai	Indeks kebebasan sipil + Indeks pemenuhan hak politik + Indeks Lembaga-Lembaga / 3	
			Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAKP)	Persen	Jumlah angkatan kerja perempuan / Jumlah perempuan usia kerja x 100%	
			Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat perlindungan	Persen	Jumlah korban yang terlayani / Jumlah korban kekerasan x 100%	
			Meningkatnya fasilitasi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan trifungsi DPRD	Persentase perda yang ditetapkan	Persen	Jumlah perda yang ditetapkan dibagi jumlah raperda dikali 100	
5.	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatnya sistem manajemen SDM PNS	Nilai penataan sistem Manajemen SDM PNS	Nilai	Nilai penataan sistem manajemen SDM PNS pada Aplikasi PMPRB	BKPSDM
6.	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan PDRB	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	Jumlah produksi komoditas perikanan budidaya	Dinas Perikanan
				Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	Jumlah produksi komoditas perikanan tangkap	
				Nilai produksi pengolahan hasil perikanan	Rupiah	Jumlah Nilai produksi komoditas pengolahan hasil perikanan	
			Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk persawahan dalam mendukung pertumbuhan PDRB pada sektor pertanian	Persentase luas sawah yang mendapat layanan irigasi	Persen	Luas sawah yang beririgasi : Luas sawah keseluruhan dikali 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kesadaran mengkonsumsi hasil perikanan	Konsumsi Ikan per kapita per tahun	Kg/ Orang/ Tahun	Jumlah Konsumsi Ikan per orang per tahun	
			Meningkatnya ketersediaan pangan utama	Ketersediaan pangan utama	Persen	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun dibagi Jumlah penduduk x 100%	
				Ketersediaan energi dan protein perkapita			
- energi		kkal	(Ketersediaan pangan/kapita/hari dikali Kandungan Kalori dikali BDD) ÷ 100				
- protein		gram	(Ketersediaan pangan/kapita/hari dikali Kandungan Protein dikali BDD) ÷ 100				

NO.	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persentase jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul	Persen	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul disuatu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu dibagi dengan Total Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul disuatu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu dikali 100%	
			Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persentase pertumbuhan IKM	Persen	Jumlah IKM tahun ke-n dikurangi Jumlah IKM tahun ke (n-1) dibagi Jumlah IKM tahun ke (n-1) dikali 100%	Dinas Perdagangan dan UKM
			Meningkatnya nilai perdagangan komoditi daerah	Nilai perdagangan komoditi daerah	Rupiah	Jumlah Nilai perdagangan komoditi daerah	
				Persentase capaian retribusi pelayanan pasar terhadap target	Persen	Capaian PAD Dinas Perindagkop dibagi capaian PAD dikali 100%	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi dan UKM	Persentase koperasi aktif	Persen	Jumlah koperasi aktif dibagi Jumlah total koperasi dikali 100%	
			Meningkatnya daya tarik wisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	Tingkat pertumbuhan wisatawan dengan target kenaikan 10% pertahun	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
				Rata-rata lama tinggal	Hari	Jumlah hari wisatawan menginap di hotel	
			Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	Jumlah penerimaan PAD sektor pariwisata	Rupiah	Jumlah retribusi tempat wisata	
			Terwujudnya kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing/berprestasi	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan	Persen	Jumlah pemuda yang berperan serta dala pembangunan dibagi Jumlah pemuda Kabupaten Bombana x 100%	
				Jumlah prestasi olah raga tingkat regional	Prestasi	Jumlah medali yang diperoleh dalam even olahraga tingkat regional	
			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi Padi	Ton	Jumlah Produksi Padi pada tahun n	Dinas Pertanian
			Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Produksi Cabe	Ton	Jumlah Produksi Cabe pada tahun n	
				Produksi Bawang	Ton	Jumlah Produksi Bawang pada tahun n	
			Peningkatan Produksi tanaman Perkebunan	Produksi Kakao	Ton	Jumlah Produksi Kakao pada tahun n	
			Peningkatan Populasi Ternak	Produksi Ternak	Ton	Jumlah Produksi Ternak pada tahun n	
7.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Poin	Rumusan IKLH : (%memenuhi x70)+(%ringan x 50) + (% Sedang x 30) + (%beratx 10)	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Poin	Rumusan IKLH : 100- ((50/0,9) x (Rata-rata IEU0,1))	

NO.	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan	Poin	ITH + LTH/LWP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman serta kawasan strategis Kabupaten	Jumlah kawasan permukiman dan kawasan strategis Kabupaten yang ditingkatkan kualitas lingkungannya	Kawasan	Jumlah kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan serta kawasan strategis Kabupaten yang ditingkatkan kualitas lingkungannya	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang guna mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup	Persentase kesesuaian antara pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dengan RTRW Kabupaten	Persen	Jumlah pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang sesuai dengan rencana pola ruang pada RTRW Kabupaten : Jumlah pola ruang pada dokumen RTRW Kabupaten dikali 100%	
8.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatnya Indeks Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Indeks	Jumlah kematian ibu hamil, bersalin dan nifas dalam satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama dikali 100.000	Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka Kematian Bayi (AKB)	Indeks	Angka Kematian Bayi/1.000 Kelahiran Jumlah kematian anak usia kurang dari satu tahun dalam satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama dikali 1.000	
			Angka Kematian Balita (AkBa)	Angka Kematian Balita (AkBa)	Indeks	$AkBa = \frac{D_{0-5th}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times 1000$	
			Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persen	Persentase Layanan sesuai SPM	
			Meningkatnya upaya pengendalian penduduk	Rasio akseptor KB		Jumlah akseptor KB / Jumlah pasangan usia subur (PUS) x 100%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9.	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Penduduk Usia 25 Tahun Keatas	Persentase Kepemilikan Ijazah Penduduk Usia 25 Keatas	Persen	Jumlah Penduduk Usia 25 Tahun ke atas yang memiliki Ijazah Minimal Paket B X 100% Jumlah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Penduduk Usia 5 Tahun Keatas	Persentase SPM Pendidikan	Persen	Jumlah Penduduk Kab. Bombana Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini X 100% Jumlah Penduduk Kab. Bombana Usia 5 - 6 Tahun	
					Persen	Jumlah Penduduk Kab. Bombana Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar X 100% Jumlah Penduduk Kab. Bombana Usia 7 - 15 Tahun	
					Persen	Jumlah Penduduk Kab. Bombana Usia 7 - 18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan X 100% Jumlah Penduduk Kab. Bombana Usia 7 - 18 Tahun	
			Angka partisipasi penduduk usia 19 s.d 24 tahun yang lanjut ke Pendidikan Tinggi	Angka partisipasi penduduk usia 19 s.d 24 tahun yang lanjut ke Pendidikan Tinggi	Persen	Jumlah Penduduk Kab. Bombana Usia 19 - 24 Tahun yang menempuh pendidikan ke Pendidikan Tinggi Minimal Diploma 1 X 100% Jumlah Penduduk Kab. Bombana Usia 19 - 24 Tahun	

NO.	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka kelulusan jenjang pendidikan	Persen	$\frac{\text{Jumlah Lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	
10.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (P2KS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (P2KS)	Persen	(Jumlah P2KS tahun t / Jumlah Penduduk) * 100	Dinas Sosial
			Meningkatnya Akses KK miskin terhadap rumah layak huni	Persentase KK miskin yang memiliki rumah layak huni	Persen	Jumlah KK Miskin yang memiliki rumah layak huni dibagi Jumlah KK miskin kali 100%	Dinas Perumahan,
			Meningkatnya Akses KK miskin terhadap energi listrik	Persentase KK miskin yang memiliki akses terhadap energi listrik	Persen	Jumlah KK Miskin yang memiliki rumah layak huni dibagi Jumlah KK miskin kali 100%	
			Meningkatnya perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja	Persentase angka pengangguran	Persen	Pengangguran terbuka / angkatan kerja x 100%	Dinas Transmigrasi
				Persentase angka setengan pengangguran	Persen	Setengah pengangguran / angkatan kerja x 100%	
			Meningkatnya perlindungan bagi pekerja rentan	Persentase pekerja rentan yang mendapat perlindungan	Persen	Pekerja rentan yang terlayani / Pekerja rentan yang terdaftar x 1000%	
11.	Meningkatnya Pelestarian Budaya Lokal	Tingkat Pelestarian Budaya Lokal	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Lokal	Persentase pelestarian Seni Lokal	Persen	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Seni Lokal yang dilaksanakan}}{\text{Total Jumlah Seni Lokal}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan
				Persentase pelestarian Budaya Lokal	Persen	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Budaya Lokal yang dilaksanakan}}{\text{Total Jumlah Budaya Lokal}} \times 100\%$	
12.	Meningkatnya Minat dan Budaya Literasi Masyarakat	Indeks aktivitas literasi membaca	Meningkatnya jumlah perpustakaan yang memenuhi standar pelayanan publik	Persentase perpustakaan sesuai standar	Persen	Jumlah perpustakaan sesuai standar / Total perpustakaan yang dibina x 100%	Dinas Perpustakaan
			Meningkatnya budaya baca masyarakat	Indeks Budaya Baca	Persen	Jumlah anggota perpustakaan / Total sasaran pemustaka x 100%	
			Meningkatnya pengguna alternatif media baca	Persentase pengguna media digital (e-book)	Persen	Jumlah anggota perpustakaan mengakses digital media (e-book) / Total anggota perpustakaan x 100%	
			Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah yang profesional	persentase perangkat daerah dan desa yang mengelola kearsipan sesuai dengan standar	Persen	Jumlah perangkat daerah dan desa yang mengelola arsip sesuai dengan standar / Total Perangkat Daerah dan Desa x 100%	

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG HUKUM,



SYAHRAL ABDI ARIEF, SH

Penata Muda Tk.I, III/d

NIP. 19811110 200804 1 001

BUPATI BOMBANA,

TTD

H. TAFDIL